
BAB 3

KERAGAAN MASALAH DAN ISU POKOK PEMBANGUNAN

3.1. Keragaan Masalah Pembangunan

3.1.1. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Karakteristik Geologi

- 1) Wilayah kepala burung Papua merupakan pertemuan dua lempeng tektonik dengan sesar angkat dan sesar turun yang melintang dan membujur secara tidak beraturan.
- 2) Banyak dijumpai gunung-gunung berapi dan wilayah-wilayah potensial gempa akibat pertemuan sesar angkat dan sesar turun yang tidak padu
- 3) Fisiografi wilayah di sebelah Utara merupakan pegunungan dan bagian selatan daerah dataran dan rawa.
- 4) Tanah mineral dan gambut berawa yang luas dan relatif kurang subur belum dimanfaatkan secara optimal dan potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan melalui penerapan teknologi tepatguna.
- 5) Sungai-sungai mengalir dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara, membentuk daerah-daerah rawan banjir sepanjang panti utara dan pantai selatan
- 6) Pantai bagian selatan merupakan wilayah endapan yang luas dengan tingkat pelumpuran tinggi (wilayah Teluk), sedangkan Bagian utara merupakan pantai dengan tebing karang dan hanya sedikit pantai berpasir

Sumberdaya Hutan

- 1) Luas kawasan hutan di setiap wilayah kabupaten berbeda baik luas hutan keseluruhan maupun proporsi menurut fungsi dan peruntukannya
- 2) Pengelolaan hutan produksi dan hutan konservasi belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat adat
- 3) Potensi tegakan pada hutan produksi relatif tinggi, namun sebagian besar kawasan hutan telah dibebani hak perusahaan hutan
- 4) Kawasan konservasi khususnya pemanfaatan jasa lingkungan belum mendapat perhatian pemerintah
- 5) Perlindungan jenis fauna endemik dan dilindungi belum efektif baik ditinjau dari aspek pengawasan maupun penegakan hukum
- 6) Rehabilitasi hutan dan lahan tidak berhasil dan pembangunan hutan tanaman masih sebatas kebijakan

- 7) Pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan hutan alam oleh instansi teknis sangat lemah.

Sumberdaya Tambang

- 1) Kegiatan pertambangan umum (bahan galian dan mineral) masih terbatas pada pemberian izin dengan tahapap kegiatan eksplorasi dan penyelidikan khusus
- 2) Bahan Bahan logam, baru sebatas penunjukkan daerah prospek dan belum diketahui cadangan logammnya
- 3) Bahan tambang logam pada beberapa wilayah telah diketahui cadangan, namun belum ada izin operasional produksi
- 4) Penambangan umum tradisional belum tetata dan terawasi dengan baik
- 5) Peraturan daerah bidang pertambangan belum tersedia, sehingga investasi bidang pertambangan masih pada taraf inventarisasi potensi dan cadangan

Sumberdaya Perikanan

- 1) Kegiatan penangkapan udang di Laut Arafura sudah menunjukkan gejala overfishing, terutama untuk komoditi udang (ukuran udang yang tertangka mengalami penurunan); begitu pula dengan perairan Teluk Bintuni dan Kaimana;
- 2) Terbatasnya penerapan aturan yang berlaku pada tingkat operasional, bahkan ijin dapat dikeluarkan untuk menangkap pada wilayah tertentu (misalnya Kaimana) tetapi kegiatan penangkapan dapat dilakukan hingga ke Teluk Bintuni.
- 3) Meskipun tingkat pemanfaatan ikan pelagis baik di Perairan Utara dan Selatan Provinsi Papua Barat masih di bawah potensi lestarnya, namun ukuran hasil tangkapan menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun;
- 4) Disinyalir adanya praktek-praktek kegiatan penangkapan ikan dilakukan secara *illegal* baik ikan pelagis dan demersal, baik di perairan Utara maupun selatan;
- 5) Penangkapan ikan demersal hidup telah intensif dilakukan sehingga mengganggu stok di alam dan telah mendorong penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (bahan beracun), terutama di daerah Raja Ampat, Fakfak dan Kaimana.
- 6) Beberapa komoditi ekonomis penting perikanan seperti (kakap, kerapu dan napoleon) memiliki peluang ekspor yang besar dengan permintaan yang tinggi di pasaran luar negeri
- 7) Kegiatan budidaya kerang mutiara dan rumput laut masih terbatas pada beberapa tempat seperti Raja Ampat dan Kaimana. Pada hal beberapa lokasi seperti Fakfak dan Teluk Wondama serta Manokwari sangat potensial untuk pengembangan budidaya kerang mutiara dan rumput laut;

3.1.2. Sosial-Budaya

1) *Kepastian Status Penguasaan Tanah/Lahan.*

- a. Tanah/lahan lokasi bangunan pemerintah dan fasilitas ternyata masih sering digugat oleh warga masyarakat pemegang hak adat atas tanah/lahan bersangkutan.
 - b. Tanah/lahan adat yang diperlukan untuk lokasi kegiatan baru pembangunan/pengembangan, ternyata nilai kompensasinya yang ditetapkan warga masyarakat adat terkadang tidak rasional.
 - c. Kegiatan pembangunan dan pengembangan investasi sering terhambat akibat tuntutan hak adat atas lahan dan sumberdaya alam
- 2) Program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan belum mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, sebaliknya menciptakan ketergantungan masyarakat yang semakin kuat pada pemerintah maupun swasta.
 - 3) Percepatan pertumbuhan penduduk di kabupaten-kabupaten pemekaran lebih cepat dibanding realisasi program pembangunan infrastruktur kesejahteraan sosial.
 - 4) Kapasitas masyarakat belum cukup kuat untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya pengembangan wilayah dan investasi yang berskala ekonomi, berorientasi bisnis dan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis komersial.
 - 5) Pola Penguasaan dan Pengalihan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah belum sepenuhnya menunjang upaya-upaya pengembangan wilayah, di samping belum merangsang para pengusaha untuk melakukan investasi besar-besaran di Propinsi Papua Barat.
 - 6) Adat dan kepercayaan tertentu membatasi warga masyarakat adat untuk: (1) menjadi migran tenaga kerja potensial dalam upaya pengembangan wilayah, (2) meningkatkan produksi dan menjadi pengusaha yang berhasil serta kaya

3.1.3. Sosial Ekonomi

1) *Peranserta swasta dan dunia usaha dalam pembangunan masih belum optimal*

- (1) Kepastian hukum yang rendah;
- (2) Kurangnya insentif investasi;
- (3) Kualitas sumberdaya manusia yang rendah;
- (4) Terbatasnya infrastruktur;
- (5) Biaya ekonomi tinggi; karena penyalahgunaan wewenang, belum terjaminnya keamanan berusaha, kurang efektifnya peraturan pemerintah;

2) *Sektor Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai kendala*

- (1) Rendahnya produktivitas UMKM dan koperasi
- (2) Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif;
- (3) Masih rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi;

- (4) Kurang kondusifnya iklim usaha.

3) Sektor Pertanian

- (1) Produktivitas, efisiensi usaha yang rendah serta , keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan kredit dan infrastruktur pertanian masih belum teratasi
- (2) Tingkat kesejahteraan petani dan nelayan masih tergolong rendah yang ditandai masih tingginya angka kemiskinan.
- (3) Terbatasnya akses ke sumberdaya produktif, terutama permodalan yang disertai dengan rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian;
- (4) Penguasaan teknologi masih rendah;
- (5) Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan;
- (6) Lemahnya infrastruktur (fisik dan non fisik) pertanian.

4) Pariwisata

- (1) Kurang kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban;
- (2) Kurangnya minat dunia usaha di dalam mengembangkan obyek dan daya tarik wisata potensial dan infrastruktur yang berkenaan dengan kepariwisataan;
- (3) Pengelolaan sebagian besar daerah tuwan wisata dan aset-aset budaya masih lemah, sehingga kurang atraktif dan kurang mampu bersaing;
- (4) Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata, baik kepada masyarakat domestik maupun masyarakat internasional

5) Daya saing

- (1) Tidak kondusifnya kondisi ekonomi daerah;
- (2) Kualitas kelembagaan publik belum menunjang fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan;
- (3) Lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi peningkatan produktivitas;
- (4) Efisiensi usaha yang rendah pada tingkat operasionalisasi perusahaan;
- (5) Iklim persaingan usaha yang rendah.

6) Terbatasnya infrastruktur dasar ekonomi

1. Transportasi darat masih belum memadai baik sarana maupun prasarananya
 - a). Sistem jaringan jalan di Provinsi PAPUA BARAT belum dapat menghubungkan antar wilayah kawasan yang memiliki potensi tinggi dan cepat tumbuh;

- b). Mekanisme pendanaan yang masih mengacu pada batas-batas administrative wilayah, sehingga berdampak belum terbentuknya suatu jaringan transportasi yang terpadu di Provinsi Papua Barat;
 - c). Kinerja pelayanan prasarana jalan yang didasarkan atas kecepatan yang mampu dicapai oleh kendaraan masih rendah.
2. Transportasi laut di Provinsi Papua Barat dari segi infrastruktur masih terbatas
- a). Terbatasnya prasarana pelabuhan yang memadai;
 - b). Terbatasnya fasilitas pelabuhan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran bongkar muat di pelabuhan;
 - c). Ketersediaan fasilitas keselamatan di pelabuhan masih rendah;
3. Alur pelayaran sungai dan penyeberangan belum memadai
- a). Keterbatasan jumlah prasarana dan sarana penyeberangan;
 - b). Terbatasnya sarana yang tersedia;
 - c). Kurangnya keterpaduan pembangunan;
 - d). Terbatasnya keterjangkauan pelayanan;
 - e). Peran swasta dan Pemerintah Daerah yang belum optimal.
3. Sarana dan prasarana penerangan (listrik), Telekomunikasi dan Air bersih masih terbatas
- a). Jaringan listrik hanya mampu melayani perkotaan
 - b). Layanan telepon selular pada distrik-distrik belum optimal
 - c). Jaringan dan layanan air bersih masih terpusat di pusat kota

7) Tendensi Aglomerasi

- (1) Banyaknya daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan;
- (2) Belum berkembangnya daerah-daerah strategis dan cepat tumbuh;
- (3) Kurang berfungsinya sinergisme pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan sehingga peran daerah perkotaan sebagai "engine of development" belum berjalan dengan baik;
- (4) Kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan;
- (5) Daerah-daerah terpencil kondisinya masih terbelakang.

3.1.4. Hukum dan Kelembagaan

- 1) Lemahnya peran dan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator dan akselerator pembangunan;
- 2) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintahan yang membidangi hukum dan kelembagaan;

- 3) Kurang berdayanya fungsi lembaga adat sebagai fasilitator masyarakat dalam mendukung program pembangunan.

3.2. Isu Pokok Pembangunan

3.2.1. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- 1) Memetakan wilayah rawan gempa dan rawan gunung berapi dalam Tata Ruang Wilayah Pembangunan Provinsi
- 2) Rekonstruksi Tata Guna Hutan dan Redesign Kawasan Hutan HPH dan Penetapan Areal Kelola Masyarakat Adat serta Memacu Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman melalui Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- 3) Revitalisasi Industri Sektor Kehutanan berbasis Industri Kehutanan Terpadu dan Industri Rakyat.
- 4) Investasi sektor pertambangan perlu digalakkan dengan prioritas penambangan batubara dan bahan galian C untuk sumber PAD” serta Peningkatan Penyelidikan umum untuk bahan tambang logam pada daerah—daerah prospek untuk menentukan cadangan, daerah sub ekonomis dan daerah ekonomis
- 5) Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha pertanian dalam arti luas pada daerah-daerah potensial yang belum termanfaatkan
- 6) Perlu dilakukan rasionalisasi armada penangkapan dengan penerapan sanksi kepada yang melanggarnya.
- 7) Pengkajian stok sumberdaya ikan pelagis maupun demersal (kakap, kerapu dan napoleon) baik di seluruh Perairan Papua Barat.
- 8) Pembuatan instalasi pembenihan ikan demersal dalam upaya menggalakan kegiatan budidaya ikan demersal, sehingga tidak menganggu stok di alam.
- 9) Perlu dilakukan pemetaan perairan yang sangat sesuai untuk kegiatan budidaya kerang mutiara dan rumput laut.

3.2.2. Sosial Budaya

- 1) Penyelarasan pengembangan infrastruktur kesejahteraan sosial dengan pertumbuhan penduduk.
- 2) Pengelolaan nilai-nilai adat dan kepercayaan yg menghambat pembangunan.
- 3) Pengupayakan Pengembangan program Pengembangan masyarakat yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat.
- 4) Pengembangan jiwa kewirausahaan guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dan swasta

3.2.3. Sosial Ekonomi

- 1) Perluasan Skala Ekonomi Wilayah
- 2) Penanggulangan Kemiskinan
- 3) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat
- 4) Pengembangan Wilayah (Penyebaran Pusat-pusat Pertumbuhan)
- 5) Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar sosial ekonomi yang memadai di setiap wilayah
- 6) Pengembangan Kemitraan yang saling menguntungkan antara Pemerintah, Masyarakat dan Investor.

7) Pengembangan Daya Saing

3.2.4. Hukum dan Kelembagaan

- 1) Kepastian hukum (termasuk masalah pertanahan);
- 2) Penyelarasan Peraturan Perundangan antara Pusat-Daerah, antar Kabupaten/Kota;
- 3) Peningkatan peranan aparat pemerintahan;
- 4) Peningkatan pendidikan politik bagi aparat pemerintah
- 5) Peningkatan peranan kelembagaan adat dalam pembangunan;
- 6) Mengefektifkan Badan Promosi dan Investasi Daerah;
- 7) Meningkatkan kapasitas masyarakat adat dalam mengelola hak-hak adat yang lebih kondusif.